

ESSAI
“ OTONOMI DAERAH MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN
EKONOMI BANGSA INDONESIA ”



Dosen Pengampu:
Tisa Amalia, S.Si.T., M.H.

Disusun oleh:
Salsa Nur Syafitri (0320220103)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
POLITEKNIK ASTRA
TAHUN 2023/2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PEMBAHASAN	2
BAB III PENUTUP	3
1.1 Kesimpulan	3
1.2 Saran.....	3
DAFTAR PUSTAKA	4

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah yang sangat besar. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah pada tahun 1999. Kebijakan otonomi daerah ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola berbagai urusan pemerintahan, termasuk urusan ekonomi.

Otonomi daerah di Indonesia memiliki dasar motivasi yang menjadi pendorong utama yaitu ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, pembangunan ekonomi terpusat di Pulau Jawa, menyebabkan ketidaksetaraan pembangunan yang signifikan antar wilayah. Otonomi daerah diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan ini dengan memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Selain itu, kebijakan otonomi daerah juga muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Melalui otonomi daerah, setiap daerah memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi ekonominya sendiri, membangun infrastruktur yang diperlukan, serta merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Pemerintah pusat tetap memberikan dukungan dan arahan, namun, dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada tingkat daerah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, langkah ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Melalui otonomi daerah, diharapkan tercipta suatu model pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan mampu menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB II

PEMBAHASAN

Bagir Manan mengemukakan bahwa otonomi adalah kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Pendapat Bagir Manan tersebut pada hakikatnya bersifat akumulatif, yaitu bahwa otonomi haruslah memiliki kedua asas tersebut yaitu kebebasan dan kemandirian. Istilah otonomi sendiri atau “autonomy” secara etimologis berasal dari kata Yunani “autos” yang berarti sendiri dan “nomous” yang berarti peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Science. Otonomi dalam pengertian orisinil adalah the legal self sufficiency of social body and its actual independence. Dalam kaitan dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti self government atau condition of living under one’s own laws.

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,5% per tahun pada periode 1990-1999 menjadi 5,7% per tahun pada periode 2000-2022 (BPS, 2023).

Otonomi daerah dapat berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia melalui beberapa faktor kunci. Pertama, dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri, otonomi daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya ekonomi di tingkat lokal. Hal ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi daerah. Kedua, otonomi daerah menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di tingkat lokal, meningkatkan peluang investasi, dan mendorong perdagangan di daerah tersebut. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat melalui peningkatan investasi dan perdagangan. Selain itu, otonomi daerah juga membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pengembangan usaha dan perekonomian daerah, otonomi daerah dapat memacu kreativitas, inovasi, dan daya saing lokal yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Optimalisasi peran otonomi daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan pemerintah pusat berupa bantuan keuangan, pelatihan, dan pendampingan teknis bagi pemerintah daerah. Bantuan keuangan mencerminkan aspek fiscal decentralization, sementara pelatihan dan pendampingan teknis menunjukkan komitmen pada capacity building untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan,

dan pertukaran pengalaman juga mengacu pada prinsip-prinsip capacity development. Dalam konteks partisipasi masyarakat, upaya sosialisasi, edukasi, dan dukungan pemerintah daerah dapat dianalisis sebagai implementasi konsep partisipasi pembangunan. Dengan strategi ini, diharapkan otonomi daerah dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

BAB III PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Otonomi daerah adalah kebijakan strategis yang terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta penguatan sinergi antar daerah, akan semakin menajamkan peran otonomi daerah sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, ketimpangan antar daerah dapat dijembatani dan masa depan ekonomi Indonesia yang cerah akan terwujud.

1.2 Saran

1. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan yang memadai kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan keuangan, pelatihan, dan pendampingan teknis.
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola sumber daya ekonomi. Peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pertukaran pengalaman dengan pemerintah daerah lain.
3. Masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi daerah. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Indonesia 2023. Jakarta: BPS.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). Otonomi Daerah Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi. Jakarta: Kemendagri.

Setiawan, F. (2022). Dampak Otonomi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 23(1), 1-12.

Bagir Manan, 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm 2

Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2017). Manajemen Otonomi Daerah. Jakarta: LAN.

Setiawan, F. (2022). Dampak Otonomi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 23(1), 1-12.